



TATA KELOLA KOLABORASI DALAM PENANGANAN KEMISKINAN DI KOTA YOGYAKARTA : PROGRAM "GANDENG-GENDONG"

Eka Putra¹, Nova Elsyra², Muchamad Zaenuri³

¹Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, ²Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Setih Setio, ³Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Info Artikel

Sejarah Artikel:
Diterima: 30 April 2020
Disetujui: 10 September 2020
Dipublikasikan: 10 September 2020

Kata Kunci:

Collaborative Governance, Kemiskinan dan Gandeng Gendong

Abstrak

Collaborative Governance yang dilakukan lima *stakeholders* (Pemerintah Kota, Korporasi, Kampus, Komunitas dan Kampung) dalam upaya menurunkan angka kemiskinan di Kota Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan teori *collaborative governance* yang dilihat dari aspek pemberdayaan ekonomi mikro dan kecil, peningkatan kesejahteraan dan pemberdayaan lingkungan melalui CSR. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi bagaimana tata kelola kolaborasi program Gandeng Gendong untuk meningkatkan ekonomi masyarakat Kota Yogyakarta. Dalam penelitian program Gandeng Gendong Kota Yogyakarta peneliti menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *collaborative governance* yang dilakukan, telah memberikan dampak yang positif terhadap perekonomian masyarakat Kota Yogyakarta. Program Gandeng Gendong telah memberikan kepastian lapangan kerja, masyarakat dibekali (*soft skill dan hard skill*) dan perekonomian masyarakat meningkat dengan baik. Namun disamping banyaknya manfaat dari kehadiran program Gandeng Gendong juga terdapat sisi kelemahan dari para *stakeholders* yaitu minimnya sosialisasi program, pelatihan dan pemberdayaan, sehingga berefek memburuknya pelaksanaan program tersebut dan belum bisa dikatakan sudah maksimal kehadiran program Gandeng Gendong terhadap perekonomian masyarakat Kota Yogyakarta.

COLLABORATIVE GOVERNANCE IN POVERTY HANDLING IN YOGYAKARTA CITY: THE "GANDENG-GENDONG" PROGRAM

Keywords:

Collaborative Governance, Poverty and Gandeng Gendong

Abstract

Collaborative Governance conducted by five *stakeholders* (City Government, Corporations, Campuses, Communities, and Villages) in an effort to reduce poverty in Yogyakarta City. This study uses a *collaborative governance* theory approach which is seen from the aspects of empowering micro and small economies, improving welfare and empowering the environment through CSR (corporate social responsibility). This study aims to identify how the *collaborative governance* of the Gandeng Gendong program to improve the economy of the people of Yogyakarta City. In researching the Yogyakarta City Handling and Collaboration program researchers used qualitative methods. The results showed that the *collaborative governance* carried out had a positive impact on the economy of the people of Yogyakarta City. The Handling and Carrying Program has provided employment certainty, the

community is equipped (soft skills and hard skills) and the community's economy is improving well. But in addition to the many benefits from the presence of the Gandeng Gendong program there are also weaknesses of the stakeholders, namely the lack of program socialization, training and empowerment, so that the effect of the worsening of the program implementation can not be said to be the maximum presence of the Gandeng Gendong program to the economy of the people of Yogyakarta City.

© 2018 Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Mataram

✉Alamat korespondensi:

¹ekaputraibnumakmur@gmail.com,

²elsyranova22@gmail.com,

³e-zaenuri@yahoo.co.id

PENDAHULUAN

Berdasarkan UU No 22 Tahun 1999 di revisi menjadi UU No 32 Tahun 2004 dan UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa telah terjadi transformasi prinsip otonomi daerah di Indonesia (Beriansyah & Mutiarin, 2015:390). Berdasarkan prinsip otonomi daerah tersebut, telah dibentuk Peraturan Walikota Yogyakarta No 23 Tahun 2018 tentang Program Gandeng-Gendong Kota Yogyakarta, bahwa pada prinsipnya untuk mewujudkan masyarakat sejahtera maka diperlukan program bersama (Perwali, 2018:1). DIY masih menghadapi problem kemiskinan, sejak 2013-2017 danais (dana keistimewaan) telah digulirkan namun presentase angka kemiskinan cukup tinggi 13,1 atau sekitar 488,83 ribu penurunannya hanya sekitar 2% (Kariem & Purwaningsih, 2018:63).

Sebagai negara yang masih menganut sistem ekonomi yang bergantung pada pembiayaan di sektor publik, maka harapannya kebijakan desentralisasi bisa mengurangi angka kemiskinan namun belum banyak terpenuhi secara signifikan (Sakir & Mutiarin, 2014:464). Pembangunan di era demokrasi dan desentralisasi, partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan (Sugiarto & Mutiarin, 2017:8). Pembangunan partisipatif merupakan ciri khas negara modern, bisa menjamin kepentingan masyarakat diakomodir dan mensejahterakan rakyat secara cepat (Andi, 2017:3; Nurmandi, 2014:57). Menurut Bevir perlu adanya transformasi dalam tata pengelolaan pemerintahan dari sistem hirarki menuju jaringan dan kemitraan, Frederickson perlu adanya aktor non-negara dilibatkan dalam proses urusan pemerintahan (Zaenuri, 2016:4).

Masyarakat sedang menghadapi tantangan sosial, ekonomi, dan lingkungan yang semakin meningkat secara kompleks (Al-tabbaa et al. 2019:1).Ketidaksetaraan ekonomi meningkat dalam demokrasi di seluruh dunia dan menimbulkan ancaman yang jelas terhadap stabilitas (Dixon & Suk 2017:369). Hampir semua masalah yang kita hadapi sekarang masalah kolektif: yang lebih besar daripada diri sendiri yang membutuhkan

pemahaman kolektif dan global, hanya dapat benar-benar diatasi melalui diskusi multilateral (Graham et al. 2018:2). Perlunya *collaborative governance*, orang dan organisasi melintasi batas, menyelesaikan satu *promlem* bersama, dan tata kelola kolaboratif dimaksudkan mendorong tindakan atau hasil yang tidak mungkin dicapai oleh organisasi mana pun yang bertindak sendiri (Emerson & Nabatchi 2015:718).

Salah satu akibat kemiskinan berkurangnya efisiensi sejumlah proses ekonomi dan keterbatasan fasilitas dalam aktivitas produksi (Jared, 2017:319). Terjadinya perbedaan pendapatan akibat distribusi pendapatan disetiap kelompok masyarakat pendapatan tinggi, pendapatan rendah, jumlah penduduk dibawah (*poverty line*) dan jumlah angka pendidikan rendah. Kebutuhan pokok mengalami peningkatan harganya, jumlah angka pengangguran meningkat (Endrayani & Dewi, 2016:64, Puspita, 2015:101). Menurut Hatta (2014:63) ekonomi masyarakat Indonesia tidak individualisme tetapi pada dasarnya masyarakat Indonesia masih bersendi kepada kolektivisme. Heywood (2016:100), terkait pemerataan kesejahteraan sosial, kaum liberal modern melihat manajemen ekonomi sebagai hal yang konstruktif untuk mempromosikan kemakmuran dan harmoni di masyarakat sipil.

Salah satu cara menurunkan angka kemiskinan dengan program yang pro terhadap rakyat (Bakhtiar & Zuly, 2015:207). Peningkatan kualitas SDM masyarakat, melalui pengembangan kemampuan SDM, dengan program pelatihan *soft skill*, *hard skill* dan bermitra dengan berbagai unsur organisasi (Pribadi & Zaenuri, 2017:33). Ada kelemahan dimasyarakat keterbatasan kemampuan memproduksi atau membuat sesuatu produk dan keterbatasan teknologi informasi (Zaenuri & Sulaksono, 2016:32). Era sekarang paradigmanya developmentalisme yang mengedepankan atau mementingkan industrialisasi dan pertumbuhan disektor ekonomi (Ramdani et al, 2018:22).

Perkembangan masyarakat miskin di Kota Yogyakarta dari tahun 2015 ke tahun 2018 presentasinya mengalami penurunan angka kemiskinan;

Tabel 1.

Jumlah Penduduk Miskin di Kota Yogyakarta 2015 – 2018

Variabel Kemiskinan	Kemiskinan Kota Yogyakarta			
	Tahun			
	2015	2016	2017	2018
Jumlah Penduduk Miskin (Dalam Ribu Jiwa)	36	32.06	32.20	29.75

Sumber : BPS Kota Yogyakarta 2019

Ide awal program Gandeng Gendong adalah saling bahu membahu dalam rangka menurunkan angka kemiskinan di Kota Yogyakarta dengan melibatkan lima elemen Pemerintah Kota, Korporasi, Kampus, Kampung dan Komunitas. Fokus program Gandeng Gendong memberdayakan masyarakat yang sesuai potensi lokal, seperti olahan kuliner, produk kerajinan dan dalam hal yang lebih teknis misalnya pelatihan kuliner dibimbing langsung oleh pihak *chef* dari hotel sebagai bentuk dari program CSR.

Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti mencoba mendalami kasus di atas dengan meneliti secara lebih mendalam dengan tema Tata Kelola Kolaborasi Dalam Penanganan Kemiskinan Di Kota Yogyakarta : Program Gandeng Gendong. Oleh karena itu penelitian ini menganalisis bagaimana tata kelola kolaborasi program Gandeng-Gendong dalam meningkatkan ekonomi masyarakat Kota Yogyakarta.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan metode kualitatif dan pengumpulan data menggunakan wawancara dengan pihak terkait atau pemilik data untuk mengolah dokumen. Meleong (2016:6) penelitian metode kualitatif, tujuannya untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian, contohnya; suatu perilaku, motivasi, persepsi, tindakan dan lain-lain. Penelitian kualitatif dirasa sangat tepat digunakan dalam penelitian ini, karena memberikan seluas-luasnya kepada peneliti untuk memfokuskan permasalahan yang hendak diteliti secara mendalam. Unit analisis data yaitu Bappeda Kota Yogyakarta, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak, Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Cabang Senopati, Universitas Negeri Yogyakarta, Kel Pakuncen Kc Wirobrajan, Rejowinangun Kota Gede, Bausasaran Kc Danurejan, Baznas Kota Yogyakarta. Teknik pendekatan wawancara dan pengumpulan data terkait tata kelola kolaborasi dalam penanganan kemiskinan di Kota Yogyakarta : Program Gandeng Gendong.

PEMBAHASAN

Kota Yogyakarta dalam mewujudkan masyarakat sejahtera, maka dalam bentuk komitmennya lahirlah program Gandeng Gendong sebagai program

bersama yang menanamkan dan mengembangkan nilai-nilai kerjasama, kepedulian, kebersamaan, kemandirian dan kedisiplinan. Bentuk nyata pelaksanaan program ini, dikuatkan oleh lima *stakeholders*, Pemerintah Kota, Swasta, Perguruan Tinggi, Komunitas dan Kampung. Masing-masing *stakeholders* memiliki tugas dan wewenang dalam pelaksanaan program kemiskinan tersebut. Seluruh elemen lima *stakeholders* tersebut terlibat dalam rangka percepatan pencapaian program penanggulangan kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan dilingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta melalui program Gandeng-Gendong.

Berdasarkan laporan dari Kantor Dalbang Kota Yogyakarta 2019, bahwasanya Pemerintah sebagai aktor utama program Gandeng Gendong telah mengidentifikasi beberapa permasalahan yang ada di pemerintahan Kota Yogyakarta dilihat dari tiga aspek yaitu kondisi a. Fisik; 1. Pengendalian pemanfaatan ruang kurang optimal, 2. Air bersih terbatas alih fungsi prasarana ruang publik, peran angkutan umum rendah, 3. Fasilitas penyediaan sanitasi belum, 4. Implementasi dari *roadmap* belum selesai dan manajemen kepegawaian belum berbasis kompetensi, 5. Kebutuhan produk hukum belum terpenuhi dan layanan IT belum menjangkau semua SKPD, 6. Upaya preventif pengendalian konflik SARA belum terkondisi, 7. Penurunan partisipasi dan peran masyarakat dan sistem penanganan bencana belum terpadu. b. Sosial; 1. Pengendalian kependudukan, 2. Optimalisasi sistem pelayanan kesehatan, 3. Pemenuhan akses pendidikan, 4. Rendahnya penanganan terhadap masyarakat kelompok rentan, 5. Optimalisasi pengembangan budaya lokal dan pemberdayaan perempuan, 6. Optimalisasi pembinaan olahraga. c. Ekonomi; 1. Kemiskinan dan ketimpangan tinggi, 2. Pengangguran tinggi, 3. Kesempatan kerja terbatas, 4. Pengelolaan pariwisata belum optimal, berdasarkan tiga kondisi tersebut maka “perlunya pengembangan di berbagai sektor”.

Collaborative Governance Program Gandeng Gendong

Collaborative governance salah satu cara atau metode yang lebih efektif dalam pembangunan di era kontemporer sekarang, karena proses pembangunan tidak lagi berasal dari satu *stakeholder* tetapi bisa melibatkan berbagai *stakeholders*. Berbagai alasan pembangunan dimasa sekarang memerlukan kolaborasi dalam menyikapi permasalahan publik, bisa berupa

kesamaan visi dan misi, karena jika dilakukan sendiri *problem* tersebut terasa sangat kompleks. Kolaborasi kalau dilihat secara umum bisa dibedakan ada dua pengertian, *pertama*, kolaborasi secara proses. *Kedua*, kolaborasi secara normatif. *Collaborative governance* yang telah dilakukan oleh lima *stakeholders* (Pemerintah Kota, Korporasi, Kampus, Komunitas dan Kampung) ini dikategorikan kolaborasi dalam arti proses.

Hal demikian karena *collaborative governance* yang telah dilakukan bersifat interaktif di setiap para aktor pemangku kepentingan dan juga cenderung formal. Tidak hanya perilakunya, namun peneliti berusaha menganalisis proses kolaborasi yang dilakukan pemerintah sebagai pelaku utama dengan pihak *stakeholders* terkait efektif atau tidak pelaksanaan program Gandeng Gendong. Kolaborasi dalam arti proses yang telah dilakukan secara interaktif oleh pihak pemerintah Kota Yogyakarta dengan mitranya, oleh penelitian bertujuan melihat proses *collaborative governance*. Berawal dari pentingnya berbagai pihak yang terkait untuk ikut andil dalam upaya penurunan angka kemiskinan di Kota Yogyakarta maka sangat diperlukan penggalangan kekuatan secara bersama. Program Gandeng Gendong kenapa menjadi hal yang penting karena terdapat banyak sisi manfaatnya terhadap masyarakat luas khususnya masyarakat Kota Yogyakarta.

Face to Face Dialogue (Dialog/Tatap Muka)

Dialog/tatap muka yang dimaksud (Ansell dan Gash, 2018), bahwa *collaborative governance* berorientasi kepada konsensus atau kesepakatan bersama melalui tatap muka langkah yang sangat penting dalam tahap kolaborasi. Tatap muka proses inti yang dilakukan oleh para pihak pemangku kepentingan untuk membangun kepercayaan, pemahaman bersama, saling menghormati dan berkomitmen terhadap proses. *Face to face dialogue* dilakukan oleh lima *stakeholders* (Pemerintah Kota, Sawasta, Kampus, Komunitas dan Kampung) dalam bentuk pemberdayaan, pelatihan dan sosialisasi.

Pemberdayaan, pelatihan dan sosialisasi dilakukan setiap dari instansi masing-masing sesuai dengan tupoksi masing-masing dan setiap kegiatannya selalu berkolaborasi salah satu diantara empat tersebut. Dalam proses pelaksanaan kolaborasinya masing-masing saling melengkapi antar *stakeholders* yang terkait. Fungsi pemberdayaan, pelatihan dan sosialisasi untuk memberi

kemudahan komunikasi dalam mencapai tujuan bersama program Gandeng Gendong Kota Yogyakarta. Selain memberi kemudahan komunikasi juga sarana untuk membangun kepercayaan setiap *stakeholders*, bisa dilihat dari *stakeholdersnya* jika melakukan pemberdayaan, pelatihan dan sosialisasi kepada masyarakat.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Yogyakarta jum'at february 2019, melakukan agenda sosialisasi sejumlah program Gandeng-Gendong sebagai langkah awal prioritas, agar program tersebut dengan mudah dipahami masyarakat. Tempat sosialisasi tersebut tepatnya di Pendopo Kelurahan Panembahan, Jalan Langenastran Lor Kota Yogyakarta, agenda sosialisasi tersebut sebagai narasumber Retnosari, SH, MH staf DPMPPA dan Agus Salimi, SE, MA staf Bappeda, ikut dihadiri mulai dari ketua RT se Kelurahan Panembahan Kecamatan Keraton.

Materi dalam sosialisasi program tersebut memuat tentang *roadmap* masalah Kota Yogyakarta dan maksud kehadiran program Gandeng-Gendong sebagai solusi terhadap masalah tersebut. Program Gandeng-Gendong berdasarkan *roadmap* sudah memiliki potensi dan kekuatan masing-masing di setiap daerah, ada suatu daerah yang kuat potensi kesenian, ada yang memiliki potensi dibidang kuliner, dan ada yang memiliki potensi masak memasak. Maka kemudian tujuan kehadiran program Gandeng-Gendong tersebut untuk mengatur dan menyesuaikan mana daerah yang memiliki potensi dan daerah yang tidak memiliki potensi.

Trust Building (Membangun Kepercayaan)

Membangun kepercayaan yang dimaksud (Ansell dan Gash, 2018), bahwa peran aktor pembuat kebijakan tidak hanya bernegosiasi antar sesama para *stakeholders*, namun membangun kepercayaan antar sesama pemangku kepentingan. *Collaborative governance* hadir sebagai bentuk dari kurangnya kepercayaan antara *stakeholders*, sehingga memerlukan sikap saling bekerja sama antar sesama pemangku kepentingan. *Trust building* dalam program Gandeng Gendong Kota Yogyakarta masih bersifat dalam bentuk parsial yaitu sebagian, karena bentuk komunikasinya dan juga koordinasinya masih belum menyeluruh.

Penyebab hal tersebut karena masing-masing *stakeholders* masih terhalangi oleh kesibukan pekerjaan di instansi masing-masing, sehingga menimbulkan ada perbedaan pendapat dan akhirnya kesulitan untuk memaksimalkan program yang telah ditetapkan. Masyarakat Kota Yogyakarta yang ekonominya mayoritas menengah kebawah menjadi skala prioritas dari program tersebut. Kehadiran program tersebut memberikan tempat yang sesuai dengan peran masing-masing, masyarakat Kota Yogyakarta sebagai objek baik dari unsur OPD Kota dan Provinsi yang menggunakan jasa mereka. Pemerintah Kota Yogyakarta dan *stakeholder* yang lain sebagai subjek dari program tersebut membantu baik sebagai pembuat kebijakan maupun sumbangan dalam bentuk pemikiran dan material.

Dalam pelaksanaan program Gandeng-Gendong Pemerintah Kota Yogyakarta sebagai pemilik utama otoritas kebijakan tugasnya melakukan monitoring dan evaluasi. Lebih kurang selama dua tahun berjalannya program Gandeng Gendong banyak memberi manfaat terhadap masyarakat, tidak hanya warga Kota Yogyakarta yang menikmati hasil atau produk program Gandeng Gendong namun sudah meluas ke pemerintah provinsi DIY. Pihak swasta atau korporasi selain tugasnya memberi CSR juga ikut memberikan pemberdayaan, pelatihan (*soft skill* dan *hard skill*) dan membantu dalam mempromosi produk-produk yang telah dibuat oleh masyarakat Kota Yogyakarta yang bergabung dalam program Gandeng- Gendong. Namun peran dari pihak korporasi di akui oleh Kabid Ekonomi Bappeda Kota Yogyakarta bahwa dalam pelaksanaannya belum maksimal dari program yang telah ditetapkan.

Kemudian juga terjadi *overlapping* (tumpang tindih) kepentingan, hingga akhirnya sulit tercipta kegiatan yang efektif dan efisien. Proses kolaborasi lima *stakeholders* (Pemerintah Kota, Swasta, Kampus, Komunitas dan Kampung) dalam program Gandeng Gendong boleh dikatakan masih berfokus pada kegiatan masing-masing. Dalam membangun kepercayaan disetiap *stakeholders* tersebut masih belum terjalin dengan baik karena setiap dari instansi cara berfikirnya individualistik atau ego sektoral. Dalam upaya peningkatan kesejahteraan juga berkoordinasi dengan pihak komunitas atau kelompok masyarakat yaitu memberikan wadah atau asosiasi forum usaha mikro dan kecil dalam pengembangannya. Selanjutnya melakukan konsolidasi inter dan antar

komunitas, juga memberi usulan kebutuhan dalam mengembangkan usaha mikro dan kecil.

Commitment to Process (Komitmen Bersama)

Commitment to process yang dimaksud (Ansell dan Gash, 2018), bahwa tingkat komitmen antar *stakeholders* merupakan penentu bagi keberhasilan atau kegagalan *collaborative governance*. Selanjutnya komitmen adalah modal keyakinan untuk *collaborative process* yang nantinya akan menciptakan suatu keuntungan, baik bagi aktor pembuat kebijakan maupun publik. Proses kolaborasi yang dilakukan oleh lima *stakeholders* (Pemerintah Kota, Swasta, Kampus, Komunitas dan Kampung) dalam program Gandeng Gendong dengan komitmen berdampak positif terhadap masyarakat. Namun dalam hal kolaborasi juga memiliki sisi negatif, masalah komitmen karena terbukti masing-masing instansi masih menggunakan ego sektoral disetiap antar *stakeholders*.

Sehingga, bisa dikatakan dalam program kolaborasi Gandeng- Gendong Kota Yogyakarta masing-masing pihak memiliki komitmen bersama dengan secara sadar bertanggungjawab dalam menjalankan tugasnya serta mewujudkan mimpi bersama. Tetapi untuk dalam proses berkolaborasi secara bersama antar *stakeholders* belum bisa dikatakan secara baik masih ukuran sedang. Kolaborasi yang dilakukan belum secara menyeluruh dalam artian kolaborasi berdampak baik ke publik maupun ke sesama para pihak *stakeholders*. Sementara yang terjadi sekarang baru sebatas menguntungkan instansi masing-masing barangkali efek dari kurangnya pertemuan yang dilakukan antar *stakeholders* terkait program Gandeng Gendong. Hal tersebut diakui oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dinas PMPPA Kota Yogyakarta Retnanigtyas, SSTP, MIP, bahwa untuk yang mengkoordinir pertemuan semua *stakeholders* dilakukan oleh pihak Bappeda, sementara kewenangan Dinas PMPPA hanya fokus pada kegiatan, (wawancara pada tanggal 23 agustus 2019).

Komitmen bersama yang dilakukan oleh pihak korporasi dengan bentuk pelaksanaan program melalui pemberdayaan lingkungan melalui *Corporate Social Responsibility* sebagai bentuk tanggungjawab perusahaan terhadap lingkungan keberadaan perusahaan tersebut. Sebagaimana yang di amanatkan oleh Perwali tahun 2018 tentang program Gandeng Gendong Kota Yogyakarta fungsinya kerjasama dengan usaha mikro kecil, pemberdayaan dan peningkatan

ekonomi. Kehadiran perusahaan mensupport segala bentuk program yang dibuat oleh pemerintah baik itu mengenai pemberdayaan, peningkatan kualitas ekonomi masyarakat. Selanjutnya setiap perusahaan diharuskan menggunakan serta mendahulukan tenaga lokal dalam setiap usaha maupun kegiatan lainnya yang sesuai kriterianya.

Perusahaan yang ada dilingkungan Pemerintahan Kota Yogyakarta diharuskan menggunakan setiap produk usaha masyarakat mikro dan usaha kecil lokal. Ikut mempromosikan serta memasarkan produk yang dihasilkan masyarakat dan memberikan *support* terhadap pembinaan, pelatihan mutu produk yang sesuai standar konsumen. Perusahaan memberikan dana tanggungjawab sosial dan lingkungan, fungsinya meningkatkan tanggungjawab perusahaan terhadap lingkungan diwilayahnya. Dalam keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 531 Tahun 2018 tentang Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Masa Bakti 2018-2020. Bahwa pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan perlu bersinergi dengan program pemerintah daerah agar pemerataan pembangunan ekonomi masyarakat dapat terwujud.

Share Understanding (Pemahaman Bersama)

Share understanding yang dimaksud dalam *collaborative governance* yaitu usaha menyelaraskan pemahaman bersama atau persepsi dalam hal tujuan yang akan dicapai secara *collaborative*. Hal demikian yang dimaksud oleh (Ansell dan Gash, 2018), selanjutnya *share understanding* adalah kesepakatan tentang pengetahuan yang relevan dengan masalah. Pemahaman bersama yang telah dilakukan oleh lima *stakeholders* (Pemerintah Kota, Swasta, Kampus, Komunitas dan Kampung) dalam program Gandeng Gendong bahwa *share understanding* yang dilakukan dengan proses *hearing* (mendengar langsung apa yang menjadi problem masyarakat).

Upaya peningkatan kesejahteraan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Yogyakarta sebagai pelaku utama dari program Gandeng-Gendong dengan meningkatkan *soft skill* dan *hard skill* masyarakat. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan mengembangkan bidang usaha mikro dan kecil, memberi pelatihan, pendampingan dalam hal produksi, pemasaran dan manajemen terhadap usaha mikro dan kecil. Para *stakeholders* mengadakan monev

(*monitoring* dan evaluasi) terhadap apa yang diproduksi oleh masyarakat dan melakukan studi potensi lokal. Selanjutnya para *stakeholders* (Pemerintah Kota, Korporasi, Kampus dan Komunitas) menyediakan fasilitas kebutuhan pengembangan dan pemberdayaan usaha mikro dan kecil.

Kemudian dalam proses pembangunan peran kampus sangat dibutuhkan dalam sumbangan pemikiran demi terciptanya pembangunan yang merata dan adil terhadap masyarakat. Kampus sebagai bagian dari kelompok *civil society* ikut berperan penting dalam *mensupport* setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota Yogyakarta. Peran dari salah satu dari *stakeholder* yaitu kampus melakukan Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam memberdayakan masyarakat Kota Yogyakarta. Maka terbentuk lah forum LPPM (Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat) dengan adanya forum ini bisa bersinergi dengan antar kampus di Kota Yogyakarta yang sebelumnya berjalan sendiri-sendiri dalam peran sebagai bagian membangun Kota Yogyakarta. Forum tersebut melakukan berbagai kegiatan dalam bentuk tindakan nyata dengan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, penelitian yang dilakukan oleh perguruan tinggi dilakukan dengan dua bentuk, pertama didanai oleh perguruan tinggi sendiri kedua melalui bantuan pendanaan dari pihak pemerintah dengan skema yang sudah ditentukan sesuai kebutuhan pemerintah daerah.

Forum LPPM Kota Yogyakarta sebagai bentuk wadah persatuan perguruan tinggi se-Kota Yogyakarta sebagai bentuk untuk lebih mudah dalam pemenuhan sumbangan pemikiran dan melalui peran lainnya terhadap pembangunan. Selama ini perguruan tinggi di Kota Yogyakarta dalam melakukan salah satu Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu dalam bentuk KKN sering dilakukan diluar Kota Yogyakarta. Namun setelah terbentuknya forum LPPM wadah persatuan perguruan tinggi ini semua kegiatan kampus diharapkan memprioritaskan pengabdian terhadap Kota Yogyakarta terdahulu.

Hal tersebut sebagaimana diakui oleh Komisi Bidang Penguatan dan Pemberdayaan SDM oleh Bapak Dr. Ima Ismara dari kampus UNY, bahwa tugasnya melakukan riset dan mendengar problem yang terjadi di masyarakat dan membantu pembuatan alat produksi. Dalam proses *hearing* tersebut memang belum sepenuhnya maksimal, barangkali harus di akui program ini belum begitu lama jalannya baru masuk dua tahun. Cara berpikir dari para

stakeholders seharusnya memang memiliki pemahaman bersama terhadap program Gandeng- Gendong namun pemikiran itu tidak berjalan semestinya.

Sudah 20 kampus yang ikut bersinergi dengan pemerintah Kota Yogyakarta dalam mendukung berbagai agenda penelitian dan kegiatan pemerintah lainnya, pada tahun 2019 pemerintah Kota Yogyakarta menganggarkan Rp 200 juta untuk agenda penelitian oleh dosen melalui tim jaringan penelitian Kota Yogyakarta. Pihak Bappeda juga mengalokasikan anggaran Rp 150 juta untuk program pendampingan pengabdian masyarakat kuliah kerja nyata (KKN) dan kemitraan penelitian. Bappeda Kota Yogyakarta telah menginventarisasi beberapa kegiatan organisasi perangkat daerah yang membutuhkan kemitraan dengan perguruan tinggi di antaranya tentang penyusunan rencana induk sistem proteksi kebakaran untuk pemetaan potensi kesiap-siagaan bahaya kebakaran, workshop karya ilmiah, *assessment* anak berkebutuhan khusus, dan pembinaan regulasi dan sertifikasi di bidang kesehatan.

Intermediate Outcomes (Hasil Sementara)

Berbagai hasil studi menunjukkan bahwa kolaborasi lebih mungkin terjadi apabila tingkat kolaborasinya relatif konkret artinya tujuan dan keuntungan benar-benar dilakukan bersama. Dalam proses *intermediate outcomes* diartikan sebagai hasil dari proses yang penting untuk membangun momentum yang dapat menyebabkan keberhasilan kolaborasi. Bisa memberikan *feedback* berkat keberhasilan dari proses kolaborasi dan mendorong terciptanya siklus yang lebih baik dalam membangun kepercayaan serta komitmen. Dalam program Gandeng-Gendong Kota Yogyakarta yang dilakukan oleh lima *stakeholders* (Pemerintah Kota, Swasta, Kampus, Komunitas dan Kampung) telah banyak memperoleh keberhasilan dari program *collaborative governance* tersebut.

Keberhasilan program Gandeng Gendong bisa dilihat dari sejak diluncurkan program ini pada tanggal 10 april 2018 ke masyarakat Kota Yogyakarta yang visi dan misinya ingin menurunkan angka kemiskinan lewat kolaborasi. Hal tersebut di akui oleh beberapa kelompok program Gandeng Gendong, pertama dari Ibu Fitri Sulistyowati Kecamatan Danurejan, bahwa perekonomiannya membaik sejak hadir dan bergabungnya dia dengan program Gandeng-Gendong. Program Gandeng Gendong ini juga memfasilitasi *market*

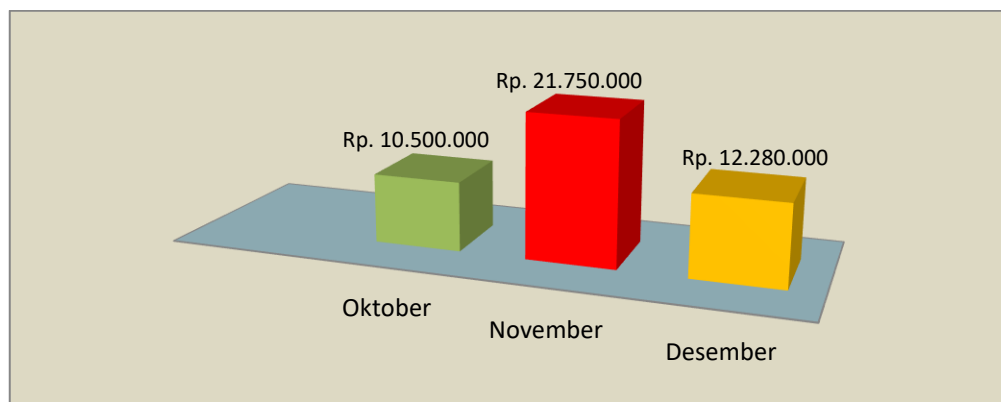
place yang jelas bagi warga Kota Yogyakarta misalnya; menyuplai Nasi Kotak dan *Snack* ke OPD Kota Yogyakarta dan OPD DIY juga ke alun-alun atau ke tempat wisata lainnya, (wawancara pada tanggal 26 agustus 2019).

Hal serupa juga di akui oleh Ibu Sri Nuryanti bahwa perekonomiannya membaik sejak bergabung dengan program Gandeng Gendong, karena *soft skill* dan *hard skill* masyarakat yang tergabung dengan program tersebut difasilitasi dengan baik. *Soft skill* yaitu mengenai sosialisasi, pemberdayaan dan pelatihan dari program Gandeng Gendong secara teoritis diberi pemahaman mengenai bagaimana produksi dan memasarkan produk. *Hard skill* yaitu pelatihan secara langsung oleh pihak swasta atau hotel yang ada di Kota Yogyakarta, dan di kurasi (penilaian secara teknis) tentang SOP (*standard operational procedural*) produk yang dipasarkan ke hotel maupun ke masyarakat umum, (wawancara pada tanggal 03 september 2019).

Sehubungan dengan hal tersebut juga diakui pernyataan yang sama oleh Ibu Asri Mikatsih Ketua Kelompok Pakuncen Kecamatan Wirobrajan, bahwa sejak bergabung dengan program Gandeng Gendong yang bagian Kuliner, perekonomiannya sangat meningkat dari sebelumnya. Keunggulan program ini menyediakan *market place* dan aplikasi Nglarisi di JSS (*Jogja Smart Service*) bagi ibu-ibu rumah tangga yang berpenghasilan rendah dan tidak memiliki penghasilan yang tetap, (wawancara tanggal 04 september 2019). Program *collaborative governance* yang dilakukan oleh lima *stakeholder* (Pemerintah Kota, Korporasi, Kampus, Komunitas dan Kampung) sedikit banyak telah membantu masyarakat Kota Yogyakarta keluar dari tingkat kesenjangan perekonomian. Pemerintah Kota Yogyakarta telah berhasil membuat terobosan sebuah kebijakan baru terhadap sejumlah permasalahan kemiskinan yang ada dan dengan tanggap menyikapinya dengan berkolaborasi berbagai unsur *stakeholder*. Keberhasilan program Gandeng-Gendong Kota Yogyakarta sangat signifikan berdampak ke pelaku UKM dan pelaku industri lainnya, berikut pertumbuhan omset atau pendapatan dari salah satu kelompok kuliner program Gandeng Gendong Kota Yogyakarta yaitu kelompok Pakudaya *Culinary* dengan grafik sebagai berikut:

Grafik 1.

Pertumbuhan Omset Pakudaya *Culinary* Oktober s/d Desember 2018



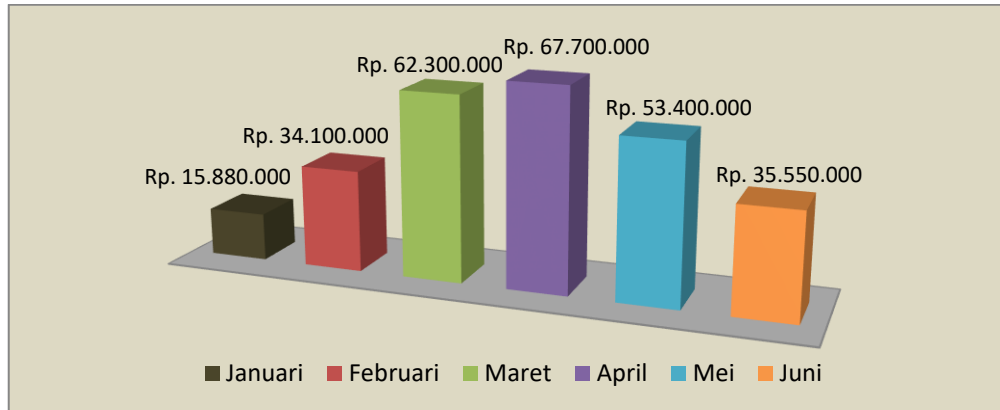
Sumber : Data diolah Peneliti dari Kelompok Pakudaya *Culinary*, 2019

Grafik 1, di atas salah satu kelompok kuliner program Gandeng Gendong Kota Yogyakarta mengalami peningkatan secara fluktuasi (naik turun) omset kelompok Pakudaya *Culinary*. Pada tahun 2018 pendapatan kelompok Pakudaya *Culinary* di bulan oktober berjumlah Rp. 10.500.000.00 kemudian meningkat menjadi dua kali pada bulan november berjumlah Rp. 21.750.000.00 sementara pada bulan desember terjadi penurunan secara signifikan pendapatan berjumlah Rp. 12.280.000.00. Pada tahun 2019 omset atau pendapatan kelompok Pakudaya *Culinary* mengalami fluktuasi seperti di tahun 2018, namun cukup signifikan pendapatan perbulan dari sebelumnya.

Kemudian pertumbuhan omset Pakudaya *Culinary* dari januari sampai juni 2019, untuk januari berjumlah Rp. 15.880.000.00 meningkat di bulan februari berjumlah Rp. 34.100.000.00 juga terjadi di bulan maret meningkat tajam berjumlah Rp. 62.300.000.00. Pada bulan april terus meningkat berjumlah Rp. 67.700.000.00 dan mulai pada bulan mei terjadi penurunan berjumlah Rp. 53.400.000.00 hingga di bulan juni secara signifikan terjadi penurunan omset atau pendapatan berjumlah Rp. 35.550.000.00. Kemudian omset kelompok Pakudaya *Culinary* program Gandeng Gendong berdasarkan wilayah konsumen yang menggunakan produk UKM terus mengalami peningkatan.

Grafik 2.

Pertumbuhan Omset Pakudaya *Culinary* dari Januari sampai Juni 2019

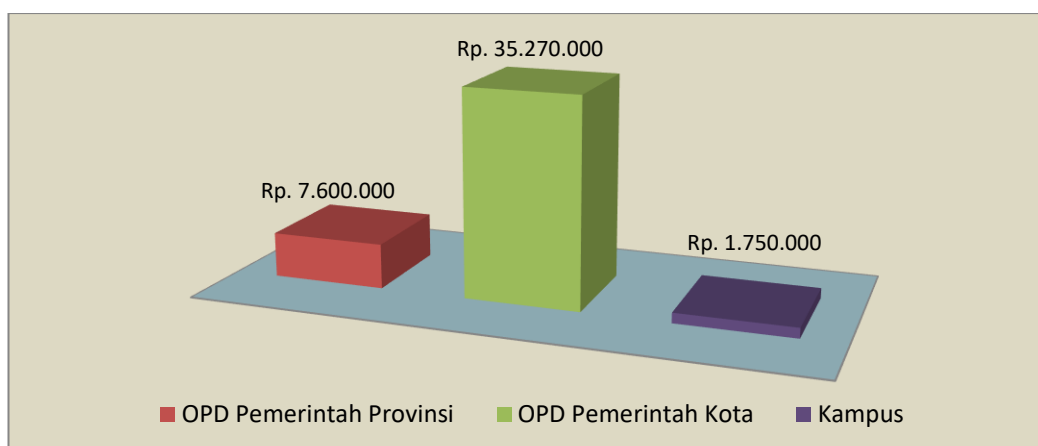


Sumber : Data diolah Peneliti dari Kelompok Pakudaya *Culinary*, 2019

Pertumbuhan Omset Pakudaya *Culinary* dari Tiga Daerah Tahun 2018, yang menggunakan produk kuliner program Gandeng Gendong kelompok Pakudaya *Culinary* tiga tempat yaitu OPD Pemerintah Provinsi DIY, OPD Pemerintah Kota Yogyakarta dan Kampus. Berdasarkan grafik 5.3 berikut ini jumlah konsumen yang paling dominan OPD Pemerintah Kota Yogyakarta berjumlah Rp. 35.270.000.00, OPD pemerintah Provinsi DIY berjumlah Rp. 7.600.000.00 dan terakhir Kampus berjumlah Rp. 1.750.000.00.

Grafik 3.

Pertumbuhan Omset Pakudaya *Culinary* dari Tiga Daerah Tahun 2018



Sumber : Data diolah Peneliti dari Kelompok Pakudaya *Culinary*, 2019

Pertumbuhan omset atau pendapatan kelompok kuliner program Gandeng Gendong Pakudaya *Culinary* pada tahun 2019 mengalami peningkatan dari tahun 2018 yaitu menjadi lima tempat. Pertama yang paling tinggi konsumennya masih dari OPD Pemerintah Kota Yogyakarta berjumlah Rp. 134.580.000.00 yang kedua dari OPD Pemerintah Provinsi DIY berjumlah Rp. 51.150.000.00, dari Kecamatan dan Kelurahan berjumlah Rp. 48.850.000.00, dari pihak Kampus berjumlah Rp. 13.700.000.00, dan umum yang masih terendah yaitu berjumlah Rp. 11.300.000.000. Bukti pemerintah Kota Yogyakarta memang benar-benar berkomitmen secara serius bisa dilihat dengan presentasi konsumsi yang tertinggi dari grafik di atas baik di tahun 2018 hingga lebih meningkat di tahun 2019 berikut grafiknya:

Grafik 4.

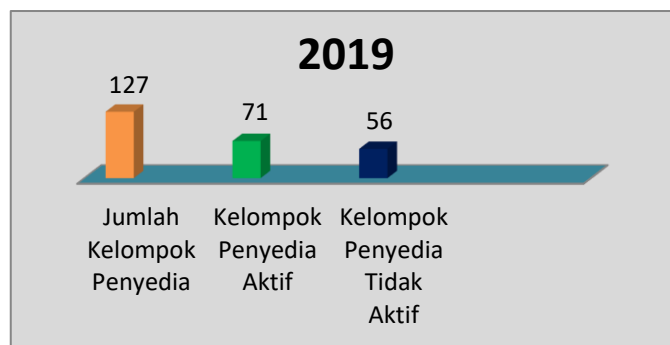
Pertumbuhan Omset Pakudaya *Culinary* dari Lima Daerah Tahun 2019



Sumber : Data diolah Peneliti dari Kelompok Pakudaya *Culinary*, 2019

Grafik 5.

Jumlah Kelompok Penyedia Maret s/d Agustus Tahun 2019

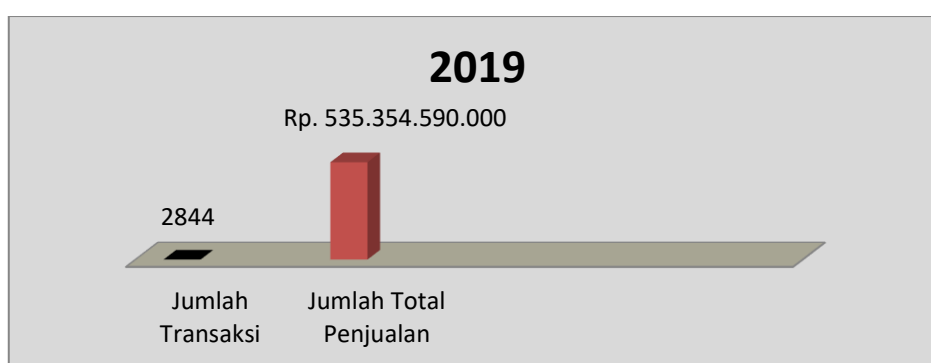


Sumber: Data diolah Peneliti dari Kantor Dalbang Kota Yogyakarta, 2019

Selanjutnya grafik 6, jumlah kelompok penyedia kuliner program Gandeng Gendong Kota Yogyakarta aktif dan tidak aktif dari maret sampai dengan agustus tahun 2019 berjumlah 127, yang aktif 71 yang tidak aktif 56. Kemudian grafik 5.2 jumlah transaksi kelompok penyedia kuliner dengan pemerintah Kota Yogyakarta berjumlah 2844 kali dan jumlah total penjualan dari penyedia kuliner Rp.535.354.590.000.

Grafik 6.

Jumlah Transaksi dan Jumlah Total Penjualan Maret sd Agustus 2019



Sumber: Data diolah Peneliti dari Kantor Dalbang Kota Yogyakarta, 2019

KESIMPULAN

Collaborative Governance yang dilakukan masih dalam kategori adaptif yaitu masih dalam tahap memenuhi kebutuhan sesaat, belum sepenuhnya dilakukan pelaksanaan program Gandeng-Gendong. Kolaborasi belum menunjukkan kesetaraan antar *stakeholders* karena masing-masingnya masih terjebak ego institusi atau sektoral. Tingkat intensitas dalam hubungan antar lembaga *stakeholders* masih kategori tingkat sedang, yang paling tinggi hubungannya, pertama Pemerintah Kota dengan masyarakat kedua Korporasi dengan masyarakat ketiga Kampus dengan masyarakat terakhir Komunitas dengan masyarakat. Dari hasil penelitian yang mendalam tentang *collaborative governance* program Gandeng Gendong maka proses transformasi kolaborasi masih sebatas institusi atau lembaga *stakeholders* masing-masing belum secara menyeluruh. Transformasi yang dominan masih dilakukan oleh pihak pemkot Yogyakarta sebagai kedudukan yang strategis dan memiliki ruang legalitas untuk mentransformasi sementara *stakeholders* yang lain masih stagnan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti sendiri tentang *collaborative governance* program Gandeng-Gendong Kota Yogyakarta maka yang menjadi saran dalam penelitian ini diantaranya sebagai berikut: Para *stakeholders* perlu memperhatikan kembali Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 23 Tahun 2018 tentang Program Gandeng Gendong Kota Yogyakarta, Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 434 Tahun 2018 tentang Pembentukan Sekretariat Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Kota Yogyakarta dan Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 531 Tahun 2018 Tentang Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Masa Bakti 2018-2020, karena berdasarkan aturan-aturan tersebut dan berdasarkan hasil penelitian mendalam bahwa praktek pelaksanaan tidak sesuai dengan peraturan tersebut, agar kepentingan semua pihak bisa terakomodir perlunya menjadi perhatian kembali tentang peraturan tersebut. *Collaborative Governance* yang dilakukan oleh (Pemerintah Kota, Korporasi, Kampus, Komunitas dan Kampung) perlu ditingkatkan lagi dalam hal upaya *monetoring* dan evaluasi) karena hal tersebut akan membantu mengidentifikasi mana program yang potensial yang harus dilanjutkan atau program yang harus diganti dengan kebijakan baru. Sosialisasi, pelatihan dan pemberdayaan harus ditingkatkan karena apa yang telah dilakukan oleh para *stakeholders* (Pemerintah Kota, Korporasi, Kampus, Komunitas dan Kampung) belum maksimal bahkan bisa dikatakan baru mencapai 30 % pelaksanaannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-tabbaa, Omar, Desmond Leach, and Zaheer Khan. 2019. "Examining Alliance Management Capabilities In Cross-Sector Collaborative Partnerships." *Journal of Business Research* 101 (April 2018). 68–84. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.04.001>
- A.A. Ayu Dewi Larantika, 2017. *Efektivitas Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Badung*. <http://dx.doi.org/10.22225/sintesa.8.2.1064.125-129>, SINTESA (Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik)
- Bakhtiar, Nur Ahmad, and Zuly Qodir. 2015. "Implementasi Program Keluarga Harapan Sebagai Upaya Penanggulangan Kemiskinan Di Kecamatan Berbah Sleman Tahun 2013." <http://dx.doi.org/10.18196/jgpp.2015.0032>

- <http://journal.umy.ac.id/index.php/GPP/article/viewFile/2122/2048>
- Beriansyah, Alva, and Dyah Mutiarin. 2015. "*Analisis Hasil Reses DPRD Dalam Penyusunan Dan Penetapan APBD Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun Anggaran 2014.*" <http://journal.umy.ac.id/index.php/GPP/article/viewFile/2127/2053> di akses 28 Maret 2019 Pukul 17:13 WIB
- BPS, and DIY. 2017. "*Analisis Kriteria Dan Indikator Kemiskinan Multidimensi Untuk Diagnostik Kemajuan Daerah Di Daerah Istimewa Yogyakarta.*" <https://yogyakarta.bps.go.id/> di akses 23 Maret 2019 Pukul 22:19 WIB
- Dixon, Rosalind, and Julie Suk. 2017. "*Liberal Constitutionalism and Economic Inequality,*" 369–401. https://lawreview.uchicago.edu/sites/lawreview.uchicago.edu/files/05%20Dixon%20%26%20Suk_SYMP_Online.pdf di akses 17 Maret 2019 Pukul 23:16 WIB
- Diamond, Jared, 2017, "*COLLAPSE-Runtuhnya Peradaban-Peradaban Dunia*", Kepustakaan Populer Gramedia, Jakarta.
- Dardiri, Yusuf, Sri Hartoyo, and Ma'mun Sarma. 2014. "*Strategi Penanggulangan Kemiskinan Di Kota Bogor Melalui Pendekatan Anggaran Dan Regulasi.*" <http://journal.ipb.ac.id/index.php/jurnalmpd/article/viewFile/24644/16056>, Jurnal Manajemen Pembangunan Daerah.
- Emerson, Kirk, and Tina Nabatchi. 2015. "*Evaluating The Productivity Of Collaborative Governance Regimes: A Performance Matrix Collaborative Governance Regimes: A Performance Matrix*" 9576 (October). <https://doi.org/10.1080/15309576.2015.1031016>, Journal Public Performance & Management Review.
- Endrayani, Eni Ketut Ni, and Urmila Heny Made Dewi. 2016. "*Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota Di Provinsi Bali*" 1: 63–88. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/EEB/article/view/17369> di akses 15 Maret 2019 Pukul 22:14 WIB
- Eka Agustina, Mohd Nur. Syechalad and Abubakar Hamzah. 2018. "*Pengaruh Jumlah Penduduk, Tingkat Pengangguran Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Aceh*" 4 (September 2018): 265–

- 83.10.21157/j.ked.hewan.v%vi%i.13022, Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam
- Graham, Archie, Lindsay Macdougall, Dean Robson, and Peter Mtika. 2018. *“Exploring Practicum: Student Teachers’ Social Capital Relations In Schools With High Numbers Of Pupils Living In Poverty.”* *Oxford Review of Education* 0 (0). Routledge: 1–17. <https://doi.org/10.1080/03054985.2018.1502079>.
- Heywood Andrew, 2016, *“IDEOLOGI POLITIK Sebuah Pengantar”*, Penerbit Pustaka Belajar, Yogyakarta.
- Hatta, Muhammad, 2014, *“DEMOKRASI KITA Pikiran-Pikiran Tentang Demokrasi dan Kedaulatan Rakyat”*, Segarsy, Bandung.
- Kariem, M. Qur’anul, and Titin Purwaningsih. 2018. *“Analisis Fungsi Pengawasan DPRD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Dalam Pelaksanaan Keistimewaan”* 9: 61–81. <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/politika/article/view/18842>
- Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 434 Tahun 2018. *“Tentang Pembentukan Sekretariat Forum Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan Kota Yogyakarta.”* <https://www.jogjakota.go.id/> di akses 03 Maret 2019 Pukul 21:20 WIB
- Keputusan walikota yogyakarta nomor 531 tahun 2018. *“Tentang Pembentukan Sekretariat Forum Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan Kota Yogyakarta.”* <https://www.jogjakota.go.id/> di akses 03 Maret 2019 Pukul 21:13 WIB
- Moleong, J, 2016. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Purwanti, Dwi, Nurul, 2016, *“Kebijakan Publik dan Pemerintahan Kolaboratif Isu-Isu Kontemporer”* Penerbit: Gava Media, Yogyakarta.
- Pribadi, Ulung, and Muchamad Zaenuri. 2017. *“Penataan Kelembagaan Dan Sumberdaya Manusia Pengelola Wisata Volcano Merapi,”* 31–38. <http://journal.umy.ac.id/index.php/berdikari/article/view/4481>
- Puspita, Wahyu Dita. 2015. *“Analisis Determinan Kemiskinan Di Provinsi Jawa Tengah”* <http://dx.doi.org/10.15294/jejak.v8i1.3858>. 8 (1): 100–107. <https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/jejak/article/view/3858/3720> di akses 14 Juni 2019 Pukul 23:34 WIB

- Purwanti, Dwi, Nurul, 2016, "*Kebijakan Publik dan Pemerintahan Kolaboratif Isu-Isu Kontemporer*" Penerbit: Gava Media, Yogyakarta.
- Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 23 Tahun 2018." *Tentang Program Gandeng Gendong Kota Yogyakarta.*"<https://www.jogjakota.go.id/> di akses 12 September 2019 Pukul 23:17 WIB
- Ramdani, Rijal, Eko Priyo Purnomo, and Pramudya Dewi Retno Ahsani. 2018. "*Karet Alam Sebagai Basis Pembangunan Pedesaan Dan Peningkatan Tarap Hidup Masyarakat Yang Berkelanjutan*" 44 (1): 21–36.<http://ejournal.ipdn.ac.id/JIPWP/article/view/236> di akses 15 Agustus 2019 Pukul 17:18 WIB
- Prianto, Luhur, Andi, 2017, "*Dinamika Tata Pemerintahan Daerah, dalam ruang formulasi kebijakan tata ruang kota*", PT Samudra Biru, Bantul, DI Yogyakarta. www.cetakbuku.biz/www.samudrabiru.co.id di akses 14 Agustus 2019 Pukul 21:19 WIB
- Ran, Bing and, and Huiting Qi. 2018. "*The Entangled Twins : Power and Trust in Collaborative Governance.*" *Administration & Society*, 1–30. <https://doi.org/10.1177/0095399718801000>. di akses 24 Juli 2019 Pukul 23:19 WIB
- Sakir, and Dyah Mutiarin. 2014. "*Kebijakan Anggaran Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.*"<https://doi.org/10.18196/jgpp.4170> <http://journal.umy.ac.id/index.php/GPP/article/viewFile/2640/2603> di akses 22 Juni 2019 Pukul 21:18 WIB
- Nurmandi, Achmad, 2014, "*MANAJEMEN PERKOTAAN Teori Organisasi, Perencanaan, Perumahan, Pelayanan Dan Transportasi Mewujudkan Kota Cerdas*", Penerbit: JKSG Jusuf Kalla School Of Government Universitas Yogyakarta (JKSG UMY). <http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/4487/Manajemen%20Perkotaan-ebook.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Nurwana, Thamrin Tahir dan Basri Bado, 2017." *Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Social Trust Fund Dalam Meningkatkan Pendapatan Usaha Anggota Kelompok Binaan Dompot Dhuafa di Kota Makassar.*" <https://ojs.unm.ac.id/economix/article/view/10340/6021> di akses 18 Juni 2019 Pukul 22:38 WIB

- Saragih, Panglima Juli. 2015. "*Kebijakan Pengentasan Kemiskinan Di Daerah Istimewa Yogyakarta,*" <http://jurnal.dpr.go.id/index.php/ekp/article/view/15545-59>. di akses 14 April 2019 Pukul 23:12 WIB
- World Bank. 2015. "*Ketimpangan Yang Semakin Lebar.*" www.worldbank.org.id di akses 17 April 2019 Pukul 21:13 WIB
- Zaenuri, Muchammad. 2018. "*Tata Kelola Pariwisata-Bencana Berbasis Collaborative Governance; Konsep, Analisis dan Pemodelan*", Yogyakarta: Explore. <http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/23301>
- Zaenuri, Muchammad, and Tunjung Sulaksono. 2016. "*Pengembangan Pemasaran Makanan Berbahan Baku Katela Untuk Mendukung Wisata Kuliner Di Yogyakarta,*" 31-43. <http://journal.umy.ac.id/index.php/berdikari/article/viewFile/4466/3522> di akses 12 April 2019 Pukul 22:18 WIB